



**PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Jalan Letkol Isdiman No. 5 Purbalingga Telp. (0281) 6590726

E-mail : [dinkominfo@purbalinggakab.go.id](mailto:dinkominfo@purbalinggakab.go.id)

PURBALINGGA – 53313

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN PURBALINGGA  
NOMOR : *5551.026*  
TENTANG

PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK  
KABUPATEN PURBALINGGA

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN PURBALINGGA  
SELAKU  
PPID UTAMA KABUPATEN PURBALINGGA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan informasi dan dokumentasi pada Kabupaten Purbalingga telah ditetapkan Keputusan Bupati Purbalingga Nomor : 39 Tahun 2017 tanggal 12 Januari tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi dan Sekretariat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Purbalingga.
- b. bahwa untuk merencanakan, mengorganisasikan dan melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi menuju pelayanan informasi yang cepat, mudah dan wajar di lingkungan Kabupaten Purbalingga, perlu menetapkan Klasifikasi Daftar Informasi Publik Pemerintah Kabupaten Purbalingga;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2006 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

#### MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Penetapan Klasifikasi Daftar Informasi Publik (DIP) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama Kabupaten Purbalingga sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Penetapan Klasifikasi Daftar Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam dictum KESATU terdiri atas informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi yang wajib diumumkan secara serta merta dan informasi yang wajib tersedia setiap saat;
- KETIGA : Klasifikasi Daftar Informasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga telah tersedia dan diumumkan pada [www.plid.purbalinggakab.go.id](http://www.plid.purbalinggakab.go.id). Sebagai laman resmi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama Kabupaten Purbalingga.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan/perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purbalingga  
Pada tanggal : 9 Januari 2018

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN PURBALINGGA**

**SELAKU  
PPID Utama**



**Drs. SRIDADI, MM**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19620515 198601 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

- 1) Bupati Purbalingga;
  - 2) Kepala Bakeuda Kabupaten Purbalingga;
  - 3) Inspektur Inspektorat Kabupaten Purbalingga;
  - 4) Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga;
  - 5) Seluruh Anggota Tim yang bersangkutan.
-

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga selaku Sekretaris Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Purbalingga

Nomor : 555/026  
 Tanggal : 9 Januari 2018

Januari 2018

**DAFTAR INFORMASI PUBLIK  
 BADAN PUBLIK PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA  
 TAHUN 2018**

INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN SECARA BERKALA							
NO	RINGKASAN INFORMASI PUBLIK	PEJABAT/UNIT/OPD YANG Menguasai Informasi	WAKTU PEMBUATAN	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA			RETENSI ARSIP
				CETAK	REKAM	ONLINE	
<b>I INFORMASI YANG BERKAITAN DENGAN BADAN PUBLIK</b>							
1	Nama Badan Publik	Bagian Organisasi dan Tatalaksana	2018				
2	Alamat Badan Publik	Bagian Organisasi dan Tatalaksana	2018	√	-	-	Selama Berlaku
3	Tugas pokok dan fungsi Badan Publik	Bagian Organisasi dan Tatalaksana	2018	√	-	-	Selama Berlaku
4	Struktur Organisasi Badan Publik	Bagian Organisasi dan Tatalaksana	2018	√	-	-	Selama Berlaku
5	LHKPN	BKPPD	2018	√	-	-	Selama Berlaku
<b>II INFORMASI MENGENAI KEGIATAN DAN KINERJA BADAN PUBLIK</b>							
1	Program dan Kegiatan	Bappelitbangda	2018	√	-	-	Selama Berlaku
2	Rekap Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan	Bappelitbangda/Bagian Pembangunan	2018	√	-	-	Selama Berlaku
3	Rincian Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan	Bappelitbangda/Bagian Pembangunan	2018	√	-	-	Selama Berlaku
4	Laporan Kinerja Pemerintah (Lakip)	Bappelitbangda/Bagian Organisasi dan Tatalaksana	2018	√	-	-	Selama Berlaku
<b>III INFORMASI MENGENAI LAPORAN KEUANGAN</b>							
1	Laporan Realisasi Anggaran	Bakeuda	2018	-	-	√	Selama Berlaku
2	Laporan Arus Kas	Bakeuda	2018	-	-	√	Selama Berlaku
3	Laporan Neraca	Bakeuda	2018	-	-	√	Selama Berlaku
4	Rekapitulasi Aset dan Inventaris	Bakeuda	2018	-	-	√	Selama Berlaku
5	Ringkasan RKA - DPA	Bakeuda	2018	-	-	√	Selama Berlaku
6	RKA - DPA	Bakeuda	2018	-	-	√	Selama Berlaku
7	LKPD	Bakeuda	2018	-	-	√	Selama Berlaku
8	Opini BPK RI atas LKPD	Bakeuda	2018	-	-	√	Selama Berlaku

<b>IV LAPORAN MENGENAI PELAYANAN AKSES INFORMASI PUBLIK</b>							
1	Jumlah Pemohon Informasi	PPID	2018	-	-	√	Selama Berlaku
2	Waktu yang diperlukan dalam memenuhi Permohonan Informasi	PPID	2018	-	-	√	Selama Berlaku
3	Jumlah Pemohon Informasi yang dikabulkan	PPID	2018	-	-	√	Selama Berlaku
4	Penolakan Permohonan Informasi	PPID	2018	-	-	√	Selama Berlaku
5	Informasi tata cara memperoleh informasi dan pengajuan keberatan serta proses penyelesaian sengketa informasi publik berikut pihak yang bertanggungjawab	PPID	2018	-	-	√	Selama Berlaku
6	Informasi tentang tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran yang dilakukan pejabat Badan Publik	PPID	2018	-	-	√	Selama Berlaku
7	Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Bagian Layanan Pengadaan	2018	-	-	√	Selama Berlaku
8	Informasi Prosedur Peringatandini dan Evakuasi Keadaan Darurat di setiap Badan Publik	BPBD	2018	-	-	√	Selama Berlaku
<b>V INFORMASI LAIN YANG DIATUR DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN</b>							
1	Peraturan Daerah	Bagian Hukum	2018	-	-	√	Selama Berlaku
2	Peraturan Bupati	Bagian Hukum	2018	-	-	√	Selama Berlaku
2	Surat Keputusan Bupati	Bagian Hukum	2018	-	-	√	Selama Berlaku
<b>INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN SECARA SERTA MERTA</b>							
<b>I INFORMASI YANG DAPAT MENGANCAM HAJAT HIDUP ORANG BANYAK DAN KETERTIBAN UMUM</b>							
1	Banjir	BPBD	-	-	√	-	Selama Berlaku
2	Tanah Longsor	BPBD	-	-	√	-	Selama Berlaku
3	Kebakaran	BPBD	-	-	√	-	-
4	Puting Beliung	BPBD	-	-	√	-	-
5	Gempa	BPBD	-	-	√	-	-
6	Ketinggian Air Laut	BPBD	-	-	√	-	-
7	Huru hara/kerusuhan	Sat Pol-PP Linmas	-	-	√	-	-
<b>INFORMASI YANG WAJIB TERSEDIA SETIAP SAAT</b>							
<b>I HASIL KEPUTUSAN KEPUTUSAN BADAN PUBLIK</b>							
	Surat Keputusan Badan Publik	Bagian Hukum	2018	√	-	-	Selama Berlaku
<b>II INFORMASI TENTANG ORGANISASI, ADMINISTRASI, KEPEGAWAIAN DAN KEUANGAN</b>							
1	Profil Pegawai mengenai nama, karir, pendidikan, penghargaan dan sanksi pelanggaran	BKPPD	2018	√	-	-	Selama Berlaku

	2	Anggaran Badan Publik	Bakeuda	2018	√	-	-	Selama Berlaku
	3	Data Statistik yang dibuat dan dikelola Badan Publik	PPID	2018	√	-	-	Selama Berlaku
<b>III RENCANA KERJA PROYEK TERMASUK PERKIRAAN PENGELUARAN</b>								
	1	Rencana Kerja	Bappelitbangda	2018	√	-	-	Selama Berlaku
	2	Rencana Strategik	Bappelitbangda	2018	√	-	-	Selama Berlaku
<b>IV PERJANJIAN BADAN PUBLIK</b>								
		Perjanjian Kerjasama	Bagian Hukum	2018	√	-	√	Selama Berlaku
<b>V INFORMASI DAN KEBIJAKAN YANG DISAMPAIKAN PEJABAT PUBLIK</b>								
	1	Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang)	Bappelitbangda	2018	√	-	-	Selama Berlaku
	2	Agenda Kerja OPD	Bappelitbangda	2018				
	3	Informasi mengenai pelayanan informasi berupa prasaranan, sumberdaya yang menangani layanan informasi beserta kualifikasinya, anggaran layanan informasi Publik serta laporan keuangannya	Bappelitbangda	2018	√	-	-	Selama Berlaku
<b>VI PROSEDUR KERJA BADAN PUBLIK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN</b>								
		Standar Operasional Prosedur	PPID	2018	-	-	√	Selama Berlaku

Purbalingga, 9 Januari 2018  
 KEPALA DINAS  
 KEPALA DINKOMINFO  
 PURBALINGGA  
 Selaku  
 PEJABAT PENGELOLA  
 INFORMASI DAN DOKUMENTASI

  
**Dr. SRIDADI, MM**  
 Pembina Utama Muda  
 NIP. 19620515 198601 1 002